

Transformasi *Civic Virtue* Mahasiswa Melalui Kebijakan Kampus Merdeka

Agil Nanggala^{a,1*}, Karim Suryadi^{b,2},

^{ab}Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia

¹agilnanggala@upi.edu; ²karimsuryadi@upi.edu;

*korespondensi penulis

Naskah diterima: 8 Februari 2021, direvisi: 22 Februari 2021, disetujui: 8 Maret 2021

Abstrak

Membentuk mahasiswa sebagai warga negara muda yang beradab, perlu menjadi orientasi atas kolaborasi keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan dengan kebijakan kampus merdeka, sebagai upaya konkret dalam mengefektifkan pengelolaan bonus demografi Indonesia, karena berdampak pada modern dan komprehensifnya konsep serta praksis mengenai pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada kampus merdeka. Terlebih fakta keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan memiliki kajian yang luas, baik secara sempit (*civic education*) maupun secara luas (*citizenship education*), sehingga memiliki relevansi untuk berkolaborasi dengan kebijakan kampus merdeka, karena mengakomodir pembelajaran di kelas serta bersifat langsung dimasyarakat, yang mengarah pada upaya transformasi keadaban mahasiswa (*civic virtue*). Riset ini berbasis kualitatif melalui metode studi literatur, telaah data mengarah pada: reduksi, display juga verifikasi. Pada konteks hasil penelitiannya adalah: 1) bentuk pembelajaran kampus merdeka, mampu dioptimalkan untuk membentuk keadaban mahasiswa, karena relevan terhadap dimensi Pendidikan Kewarganegaraan, spesifiknya pada dimensi kurikuler juga sosio-kultural, 2) arah atas Pendidikan Kewarganegaraan dalam kebijakan kampus merdeka, perlu mengakomodir peneguhan kompetensi kewarganegaraan mahasiswa, sehingga merupakan langkah konkret dalam membentuk mahasiswa sebagai warga negara yang beradab.

Kata-kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Kebijakan Kampus Merdeka, Keadaban

Abstract

Forming students as young civilized citizens, needs to be oriented on the scientific collaboration of Citizenship Education with Merdeka campus policy, as a concrete effort in effective management of Indonesian demographic bonuses, because it impacts on modern and comprehensive concepts and practices of Citizenship Education learning on Merdeka campus. Moreover, the scientific fact of Citizenship Education has a wide study, both narrowly (civic education) and broadly (citizenship education), so it has relevance to collaborate with independent campus policy, because it accommodates learning in the classroom and is directly in the community, which leads to transformation efforts student civic virtue. This research is qualitatively based through the method of literature study, data analysis leads to: reduction, display and verification. In the context of the research results are: 1) independent campus learning forms, able to be optimized to shape student civility, because relevant to the dimensions of Citizenship Education, specifically on curricular and socio-cultural dimensions, 2) the direction of Citizenship Education in independent campus policy, need to accommodate strengthening citizenship competencies of students, so it is a concrete step in shaping students as civilized citizens.

Keywords: Civic Education, Independent Campus Policy, Civilization

Pendahuluan

Kampus merdeka menjadi kebijakan di pendidikan tinggi yang komprehensif, karena bersifat modern, progresif juga mengakomodir pembelajaran yang bermakna serta memiliki dampak nyata terhadap mahasiswa. Faktanya kebijakan kampus merdeka berorientasi untuk menyelesaikan berbagai masalah yang semakin dinamis dan kompleks. Sehingga merupakan wahana efektif untuk membentuk mahasiswa agar membentuk keadaban warga negara (*civic virtue*), agar mampu melakukan partisipasinya secara sukarela bahkan berkomitmen. Karena upaya dalam memajukan negara serta bangsa tidak akan optimal, apabila tanpa keterlibatan warga negara.

Tujuan mentransformasikan sikap yang mencerminkan keadaban warga negara kepada mahasiswa, tentu menjadi kebutuhan. Karena mahasiswa adalah generasi harapan yang bisa membawa bangsa pada puncak peradabannya. Dengan rasionalisasi mahasiswa dikategorikan sebagai penduduk produktif, yang memperkuat peran strategis mahasiswa. Paramita (2010: 630) mengungkapkan rata-rata mahasiswa Indonesia pada strata 1, berumur 18-24 tahun, sehingga menjadi umur produktif, yang perlu dikelola secara optimal, guna menumbuhkan sifat kreatif, demokartis, kritis dan partisipatif.

Atas kapasitasnya selaku pembelajaran umum atas mahasiswa di perguruan tinggi, idealnya Pendidikan Kewarganegaraan harus merespons realitas tersebut dengan konsep dan praksis pembelajarannya yang bersifat modern dan komprehensif. Sehingga kolaborasi dengan kebijakan kampus merdeka, perlu dilakukan, guna semakin kapabel pada pengelolaan bonus demografi, dengan didukung melalui dimensi keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan yang komprehensif. Winataputra (2016: 18) mengungkapkan Pendidikan Kewarganegaraan memiliki dimensi keilmuan yang komprehensif yaitu, kurikuler, akademik, serta sosio-kultural. Sehingga realitas tersebut memperkuat untuk terjadinya kolaborasi tersebut, karena konsep

dan praksis pembelajarannya bisa dilaksanakan secara teoretis, atau juga praktis di masyarakat.

Substansi tersebut merupakan langkah strategis untuk mewujudkan mahasiswa yang beradab. Karena warga negara yang beradab, tentu memiliki kompetensi kewarganegaraan mumpuni. Branson (dalam Lonto, 2019: 39) menjelaskan kompetensi kewarganegaraan, terbagi atas: 1) *civic knowledge* (warga negara yang berpengetahuan juga berwawasan), 2) *civic skill* (warga negara yang terampil juga ahli) dan 3) *civic disposition* (warga negara yang berkarakter juga berwatak). Tentu warga negara yang berkompetensi kewarganegaraan mumpuni mencerminkan mutu sumber daya manusia Indonesia bersifat cakap, berdaya saing dan berkepribadian.

Nanggala dan Suryadi (2020: 21) menjelaskan kolaborasi keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan dengan kebijakan kampus merdeka mengakomodir upaya merealisasikan mahasiswa guna menjadi warga negara yang beradab. Terlebih praksis pembelajaran pada kebijakan kampus merdeka begitu beragam, karena berbasis pembelajaran teoretis di dalam kelas dan pembelajaran praktis di masyarakat. Pada Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (2020) ditegaskan mengenai praksis pembelajaran kampus merdeka, berfokus pada: 1) peralihan mahasiswa, 2) riset, 3) asistensi mengajar, 4) magang, 5) upaya humanistik, 6) *entrepreneurship*, 7) aktivitas otonom, serta 8) Membangun desa juga KKN Tematik. Tetapi untuk program magang diberi indikator jelas, guna menghindari dampak negatif liberalisasi jenjang pendidikan tinggi, karena cenderung menimbulkan tenaga kerja yang murah.

Nyatanya kebijakan kampus merdeka menghendaki terwujudnya kemerdekaan dan demokratisasi pada jenjang pendidikan tinggi. Tentu perlu mengarah pada upaya memperkuat kualitas pembelajaran dan pelayanan terhadap mahasiswa. Realitas berkualitasnya pendidikan tinggi Singapura, lantaran menyesuaikan pada modernisasi, akibatnya mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan mahasiswa,

bahkan disertai pendidikan nilai, agar bersifat utuh (Daquila, 2013: 629). Sehingga riset mengenai kolaborasi kampus merdeka dengan Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk memberikan rasionalisasi tentang pentingnya mengoptimalkan kolaborasi tersebut, karena mampu membentuk keadaban mahasiswa.

Terlebih pengelolaan demografi belum berjalan dengan optimal. Karena merujuk data World Economic Forum (2019) ditegaskan daya saing Indonesia menempati urutan 50 atas 141 negara, serta masih di bawah Singapura, Malaysia juga Thailand. Realitas tersebut perlu diatasi karena Indonesia akan mendapatkan anugerah, yaitu bonus demografi, yang perlu dikelola melalui kolaborasi kampus merdeka dengan Pendidikan Kewarganegaraan. Realitas laporan Kemendikbud (2017) mengungkapkan Indonesia diproyeksi menjadi pusat ekonomi terkuat ke-5 pada 2045, juga menyokong 38% total penduduk produktif di ASEAN, sehingga berpotensi untuk menjadi negara berpengaruh di kawasan Asia Pasifik, dan mengambil peran penting dalam arah peradaban dunia ke depan.

Tentu orientasi atas penelitian ini tidak terbatas pada upaya memberikan argumentasi tentang urgensi atas pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kampus merdeka untuk membentuk keadaban mahasiswa. Tetapi juga untuk menegaskan komprehensifnya keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengatasi berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Karena eksistensi dari ilmu pengetahuan begitu penting untuk memajukan peradaban Indonesia. Termasuk Pendidikan Kewarganegaraan yang memiliki tugas mulia dalam mentransformasikan keadaban seluruh mahasiswa.

Metode

Riset ini berbasiskan kualitatif, dengan mengoptimalkan metode studi literatur. Fakta riset kualitatif bercirikan elaboratif, mendalam dan fleksibel, tentu menjadi rasionalisasi untuk menyelesaikan riset ini. Fokus referensi pada

riset ini adalah jurnal selaku referensi utama, karena memiliki keabsahan yang tinggi dan didukung melalui peraturan bahkan dokumen resmi sebagai referensi bersifat sekunder, guna menghindari kekeliruan riset, yaitu prosedural, praktis juga konseptual. Praktis telaah data dalam riset ini, mengoptimalkan teknik Miles dan Huberman (dalam Wibowo dan Wahono, 2017: 197) yang mengungkapkan analisis kualitatif secara bertahap: reduksi, display, dan verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

1) Bentuk Pembelajaran Kampus Merdeka Untuk Membentuk Civic Virtue Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan Dimensi Kurikuler juga Sosio Kultural?

Praktis pembelajaran pada kebijakan kampus merdeka tentu bersifat komprehensif, karena mengakomodir pembelajaran di kelas dan secara langsung di masyarakat. Sehingga menganalisis fakta tersebut melalui Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pijakan ilmiah dalam menyelesaikan penelitian ini. Terlebih Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai dimensi keilmuan yang komprehensif. Tetapi dalam penelitian ini berfokus pada dua dimensi yaitu PKn pada dimensi kurikuler atau kajian PKn di persekolahan serta PKn pada dimensi sosio kultural atau realitas PKn dimasyarakat, sebagai praksis untuk menegaskan relevannya bentuk pembelajaran kampus merdeka untuk membentuk keadaban mahasiswa.

Selanjutnya peneliti membagi bentuk pembelajaran tersebut, sehingga selaras dengan dimensi keilmuan PKn di atas. Dalam praktik pembelajaran kampus merdeka yang mengarah pada peralihan mahasiswa, asistensi mengajar juga riset tentu akan dianalisis melalui dimensi PKn kurikuler. Tetapi bentuk pembelajaran di kampus merdeka, seperti wirausaha, proyek independen, upaya kemanusiaan serta KKN tematik atau membangun desa, akan dianalisis okeh dimensi PKn sosio-kultural. Tetapi bagi program magang perlu diberikan indikator juga

direfleksikan, agar meminimalisir terwujudnya dampak negatif liberalisasi pendidikan tinggi.

Pertukaran pelajaran menjadi wahana strategis bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman, pandangan baru dan mempelajari budaya baru. Dalam Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (2020) diungkapkan tentang tujuan pertukaran pelajar adalah untuk memberikan perspektif pemikiran baru bagi mahasiswa, memperkenalkan kemajemukan bangsa, mentransformasikan peduli lingkungan dan peka sosial bagi mahasiswa. Sehingga substansi tersebut relevan terhadap orientasi PKn pada perguruan tinggi atau persekolahan, karena menegaskan pentingnya menumbuhkan mahasiswa yang memiliki sifat peka sosial, peduli lingkungan juga menghargai realitas kemajemukan bangsa. PKn berorientasi dalam memberikan pemahaman utuh kepada warga negara, sehingga secara sukarela melestarikan keberagaman bangsa, berpartisipasi mengatasi problematik sosial, bahkan menjaga ekosistem, sebagai praksis dari keadaban warga negara (Dwintari, 2018: 78).

Dalam bentuk pembelajaran asistensi mengajar di satuan pendidikan, tentu menjadi wahana bagi mahasiswa, untuk mendapatkan pengalaman berharga sebagai pendidik. Tentu pada buku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dipaparkan tujuan atas pembelajaran asistensi mengajar adalah untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat, menumbuhkan minat mendidik mahasiswa, dan upaya pemerataan pendidikan Indonesia. Tentu orientasi tersebut memiliki relevansi dengan orientasi keilmuan PKn di persekolahan, karena berupaya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun warga negara beradab melalui pembelajaran PKn, berupaya dalam mewujudkan keadilan sosial berbasis keilmuan. Hamidah (2019: 38) menjelaskan PKn memiliki posisi penting pada kurikulum pendidikan tinggi, karena tugasnya begitu berat, yaitu membentuk mahasiswa agar pancasilais, sehingga menjadi landasan dalam penguatan keterlibatan mahasiswa pada upaya

mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang beradab.

Pada bentuk pembelajaran mahasiswa, yaitu penelitian, tentu menjadi upaya strategis dalam membentuk ilmuwan muda bermoral. Pada Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (2020) dipaparkan mengenai tujuan pembelajaran riset adalah menumbuhkan sikap kritis mahasiswa bahkan melahirkan ilmuwan muda yang beradab. Sehingga tujuan tersebut begitu mencerminkan PKn di persekolahan, karena berupaya untuk membentuk mahasiswa kritis, baik dan cerdas, dan PKn berkompeten memberikan informasi mengenai realitas dan masalah yang bisa menjadi fokus dan alternatif penelitian. Setiarsih (2017: 76) menjelaskan bahwa PKn bertujuan untuk membentuk sikap kritis siswa, karena kajiannya mengarah pada dinamika kebangsaan dan politik, kebudayaan kemanusiaan, sosial, sebagai realitas keadaban bangsa Indonesia.

Bentuk pembelajaran kampus merdeka berupa magang, tentu perlu disertai indikator tegas, guna menghindari dampak negatif dari liberalisasi pendidikan tinggi. Melalui Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (2020) dijelaskan tentang tujuan pembelajaran magang adalah untuk mengenalkan industri pada mahasiswa, menumbuhkan *softskill* serta *hardskill* mahasiswa. Sehingga memberikan indikator jelas menjadi langkah strategis dalam meminimalisir terlahirnya tenaga kerja murah bahkan berbasis kebutuhan pasar, sehingga kurang memiliki relevansi terhadap PKn di persekolahan, pada tujuan berfokus pada dunia industri. Faktanya dampak negatif Liberalisasi pendidikan tinggi mengarah pada tingginya tarif pendidikan, tetapi hanya melahirkan buruh yang murah, berfokus untuk industri dan cenderung dikorupsi (Shivshenker, 2018: 22).

Dalam bentuk pembelajaran kampus merdeka berupa wirausaha, tentu memberikan pengalaman bagi mahasiswa untuk berbisnis serta membentuk mental mandiri mahasiswa. Pada Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (2020) diungkapkan tentang program

kewirausahaan bertujuan untuk menumbuhkan minat dan bakat berwirausaha mahasiswa, agar mengurangi pengangguran bahkan kemiskinan. Realitas tersebut memiliki relevansi terhadap tujuan PKn pada konsep *economic civic* yang berorientasi memberdayakan ekonomi warga negara, sebagai eksistensi PKn sosio-kultural, agar terwujudnya keadaban bangsa, karena kesejahteraan terjamin. Rubei (2014: 60) mengungkapkan *economic civic* sebagai kajian PKn bertujuan untuk memperkenalkan prinsip dan konsep ekonomi terhadap warga negara, agar mandiri melalui kewirausahaan, sehingga bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Melalui bentuk pembelajaran kampus merdeka berupa proyek independen, nyatanya menjadi wahana strategis untuk memperkuat keterampilan mahasiswa. Faktanya pada Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (2020) dijelaskan orientasi proyek independen adalah mengasah inovasi, bakat, minat juga kreativitas mahasiswa, supaya bisa berprestasi, pada tingkat nasional maupun internasional. Konsep tersebut, nyatanya relevan atas tujuan PKn sosio-kultural, khususnya pada masalah yang eksis dimasyarakat sebagai bahan proyek independen, juga relevan terhadap kompetensi PKn, yaitu keahlian, sebagai salah satu basis keadaban warga negara. PKn memiliki tujuan dalam membentuk warga negara yang terampil karena tidak sebatas dengan tujuan memberi pembelajaran dan membentuk akhlak, tetapi sifatnya komprehensif guna melahirkan warga negara yang baik serta cerdas (Wadu: 122).

Pada bentuk pembelajaran proyek atau upaya kemanusiaan, tentu merupakan wahana dalam mentransformasikan nilai-nilai tentang kemanusiaan kepada mahasiswa. Dalam Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (2020) diungkapkan tujuan proyek atau upaya kemanusiaan adalah untuk menanamkan nilai-nilai humanistik bagi mahasiswa, mempunyai sifat peka sosial yang baik, juga hidup berbasis pada agama, moral bahkan etika, guna menjadi mahasiswa yang unggul. Tentu tujuan tersebut,

begitu merepresentasikan PKn sosio-kultural karena mampu menjadi basis dan praksis atas konsep warga negara yang beradab. Tentu PKn berorientasi dalam mentransformasikan nilai-nilai humanistik pada mahasiswa yang berbasis Pancasila, agar membentuk warga negara yang pancasilais atau beradab (Fusnika, 2014: 53).

Bentuk pembelajaran kampus merdeka berupa KKN tematik atau membangun desa, menjadi wahana mahasiswa untuk mengasah berbagai keahliannya bahkan memberdayakan masyarakat. Melalui Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (2020) diungkapkan orientasi KKN tematik atau membangun desa adalah untuk membentuk sifat kepemimpinan mahasiswa, mengoptimalkan potensi desa dan memberikan pembelajaran bermakna terhadap mahasiswa, karena berbasis pada pengalaman serta bersifat langsung dimasyarakat. Realitas tersebut memiliki relevansi dengan PKn sosio-kultural, karena mengarah pada upaya konkret memberdayakan masyarakat bahkan mengasah berbagai keterampilan kepunyaan mahasiswa, sebagai implementasi keadaban warga negara. Karliani (2014: 75) memaparkan Pendidikan Kewarganegaraan bisa dikolaborasikan dengan konsep *service learning* (KKN), yang berfokus pada upaya konkret memperkuat keterlibatan dan kompetensi kewarganegaraan mahasiswa, karena *service learning* memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat realitas sosio-kultural, tentu menjadi pembelajaran bermakna dan berdampak nyata bagi mahasiswa.

Tentu analisis bersifat singkat di atas merupakan rasionalisasi logis tentang praktis pembelajaran kampus merdeka bisa menjadi wahana untuk membentuk mahasiswa beradab. Sehingga perlu dioptimalkan sebijaksana dan sebaik mungkin, agar tidak menjadi kebijakan yang sebatas prosedural dan pragmatis. Tetapi memiliki dampak nyata, pada efektifnya upaya memberdayakan mahasiswa, sehingga menjadi warga negara yang beradab. Tentu sifat yang dicita-citakan tersebut, mempermudah negara untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila serta UUD 1945.

2) Tujuan Atas Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Kebijakan Kampus Merdeka Untuk Peneguhan Kompetensi Kewarganegaraan Mahasiswa?

Upaya dalam memperkuat kompetensi kewarganegaraan mahasiswa, harus dipandang penting, tentu merupakan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan dalam kampus merdeka. Terlebih bersifat utuh, dengan mengakomodir penguatan pengetahuan, keterampilan bahkan sikap yang mumpuni, sehingga menjadi warga negara yang mampu diandalkan negara. Tentu orientasi tersebut mengarah pada upaya untuk mewujudkan warga negara yang beradab (*civic virtue*), karena menjadi warga negara yang dicita-citakan oleh negara. Pembelajaran PKn yang dipandang penting oleh Center for Civic Education pada 1999, khususnya oleh National Standard for Civics and Government, tentu mengakomodir paradigma baru PKn, adalah peningkatan mutu *civic skills*, *civic knowledge* juga *civic disposition* (Raharja, dkk, 2017: 201)

Terlebih posisi strategis Pendidikan Kewarganegaraan, sebagai pembelajaran wajib untuk mahasiswa, yang dimandatkan melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 mengenai Pendidikan Tinggi dalam Pasal 35. Tentu perlu dikolaborasikan dengan kampus merdeka, agar penerapannya bersifat optimal, khususnya pada upaya mengelola mahasiswa sebagai kekuatan demografi. Pendidikan Kewarganegaraan bisa menjadi pembelajaran yang mengoptimalkan upaya pengelolaan bonus demografi, karena struktur keilmuannya begitu komprehensif, dan berfokus pada terbentuknya warga negara yang demokratis bahkan partisipatif (Pratama, 2020: 15). Sehingga praksis pembelajaran PKn perlu meminimalisir sifat pragmatis dan prosedural, supaya efektif dalam mengelola mahasiswa, sebagai kekuatan demografi nasional.

Dalam konteks *civic knowledge*, tentu mengarah pada pengetahuan bahkan wawasan yang perlu dimiliki warga negara, agar menjadi modal akademik dan sosial bagi warga negara

dalam menjalani kehidupannya dan mengatasi masalah masyarakat. Tentu pembelajaran PKn pada kampus merdeka perlu memperkuat *civic knowledge* mahasiswa, karena tanpa wawasan serta pengetahuan yang memadai, mahasiswa tidak akan memiliki kesadaran dan komitmen dalam menjalankan partisipasinya. Pendidikan Kewarganegaraan perlu memberikan wawasan dan pengetahuan mumpuni pada peserta didik, karena menjadi basis ilmiah untuk memberikan informasi objektif tentang urgensi menerapkan hak dan kewajibannya, agar efektif, tentu perlu didukung oleh materi, strategi bahkan model pembelajaran yang utuh serta modern (Rohani dan Samsiar, 2017: 51). Karena upaya dalam mencerdaskan masyarakat tidak akan berjalan efektif apabila mahasiswa selaku warga negara tidak ditransformasikan kapasitas pengetahuan bahkan wawasannya mengenai Pancasila serta kewarganegaraan.

Karena transformasi pengetahuan serta wawasan Pancasila bahkan Kewarganegaraan, menjadi upaya ilmiah untuk membentuk warga negara beradab. Sehingga pada pembelajaran PKnnya, mahasiswa dibekali teori, pendekatan, konsep, materi bahkan temuan yang selaras dengan basis keilmuan PKn, agar mahasiswa bisa memahami dan mengaplikasikan basis keilmuan PKn dalam kesehariannya. Terlebih konsep dan praksis pembelajaran PKn dalam kampus merdeka, tentu perlu bersifat modern, menyenangkan, demokratis, kritis, partisipatif, berfokus pada mahasiswa, juga mengakomodir pembelajaran di kelas bahkan bersifat langsung dimasyarakat, agar mahasiswa bisa memahami substansi penting PKn dalam arti sempit (*civic education*) dan PKn pada arti luas (*citizenship education*). Tentu pada hasil pembelajarannya mahasiswa memiliki kemampuan kognitif PKn yang mumpuni, guna efektif selaku langkah konkret untuk membentuk mahasiswa selaku warga negara muda beradab juga cerdas.

Pada konteks *civic skills*, tentu lebih berfokus pada keterampilan atau keahlian yang harus dimiliki oleh warga negara, agar menjadi modal sosial bagi dirinya untuk berkarier serta

memenangkan kompetisi. Karena modernisasi berdampak pada terbukanya persaingan, tentu mahasiswa sebagai warga negara muda, perlu menanggapi penting realitas tersebut. Sehingga konsep dan praksis pembelajaran PKn perlu mengakomodir upaya penguatan keterampilan warga negara, sehingga menjadi modal untuk mewujudkan mahasiswa berkeadaban. Dias dan Soares (2018: 5) menjelaskan *civic skills* atau keterampilan warga negara, berfokus pada inovasi, komunikasi, berpikir kritis, kreatifitas, kepemimpinan, pengambilan keputusan, kerja sama, adaptasi serta membaca situasi, karena modernisasi, mengakibatkan mahasiswa perlu memperkuat keterampilannya, untuk menjadi bekal bertahan hidup serta mampu diandalkan oleh negara.

Tentu konsep dan praksis pembelajaran PKn harus merespons realitas tersebut, dengan tujuan pembelajaran yang komprehensif, tidak terbatas pada transformasi pengetahuan saja, tetapi juga upaya konkret penguatan keahlian atau keterampilan mahasiswa sebagai warga negara muda. Terlebih praksis pembelajaran PKn pada kebijakan kampus merdeka idealnya perlu memandang peneguhan keterampilan dan keahlian mahasiswa, selaku orientasi penting, terlebih kebijakan tersebut berorientasi untuk terbentuknya *softskill* serta *hardskill* mumpuni dan beragam mahasiswa. Sehingga kolaborasi keilmuan PKn dan kebijakan kampus merdeka, bisa terjadi secara optimal melalui upaya untuk mewujudkan keterampilan atau keahlian yang komprehensif milik mahasiswa, sebagai warga negara muda. Karena keterampilan memiliki manfaat positif yang mampu dioptimalkan oleh mahasiswa saat mereka berkarier kelak nanti, sehingga pembelajaran PKn pada kebijakan kampus merdeka, bisa bermakna dan memiliki dampak nyata terhadap kemajuan mahasiswa, karena transformasi keterampilan atau keahlian warga negara, menjadi langkah strategis dalam mewujudkan mahasiswa yang berkeadaban.

Pada konteks *civic disposition*, tentu merupakan karakter atau watak positif, yang perlu dimiliki oleh warga negara, guna menjadi

bukti ketakwaan serta keimanannya terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa, dan sebagai bentuk loyalitasnya kepada NKRI. Sehingga konsep serta praksis pembelajaran PKn dalam kampus merdeka jangan mengalpakan urgensi atas penguatan karakter, sikap serta watak, agar merepresentasikan nilai-nilai Pancasila bahkan UUD 1945. Sebagai kekuatan serta ketahanan bangsa Indonesia dalam menghadapi masifnya globalisasi bahkan westernisasi, karena dalam mewujudkan mahasiswa sebagai warga negara beradab, tidak bersifat efektif, apabila tidak eksisnya upaya habituasi karakter serta watak yang mencerminkan Pancasila dan UUD 1945, sebagai ideologi, pandangan hidup serta dasar hukum bangsa Indonesia. Habituasi Pancasila bahkan UUD 1945, perlu dilaksanakan secara konsisten terhadap generasi muda, agar bangsa mampu bertahan bahkan bisa mencapai puncak peradabannya (Nanggala dan Malihah, 2020: 4).

Tentu pembelajaran PKn pada kampus merdeka perlu memandang pentingnya, tujuan tersebut, terlebih kebijakan kampus merdeka menghendaki terbentuknya mahasiswa yang peka sosial dan berkepribadian. Karena dengan karakter serta watak mahasiswa sebagai warga negara muda yang mencerminkan Pancasila bahkan UUD 1945. Tentu akan mempermudah upaya negara dalam mewujudkan kedamaian, kedamaian, keadilan serta kesejahteraan sosial, karena didukung melalui warga negara yang berkualitas dan berkepribadian. Karena tujuan Pendidikan Kewarganegaraan, sampai kapan pun tidak akan pernah berubah, termasuk pada realitas modernisasi, yaitu transformasi warga negara yang cerdas juga baik, supaya sadar terhadap kewajiban serta haknya. Sehingga tujuan pembelajaran PKn bersifat utuh, karena mengakomodir penguatan kapasitas mahasiswa mengenai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang merupakan modal akademik serta sosial dalam mewujudkan mahasiswa guna menjadi warga negara beradab.

Rasionalisasi logis bersifat ringkas tersebut, tentu memberikan deskripsi mengenai

pentingnya arah PKn dalam kebijakan kampus merdeka yang berfokus pada usaha peneguhan kompetensi kewarganegaraan. Sebagai langkah konkret dalam mewujudkan mahasiswa, agar menjadi warga negara beradab (*civic virtue*), karena keadaban warga negara, menjadi bukti telah efektifnya upaya dalam mengelola bonus demografi. Tentu bangsa Indonesia tidak akan mengalami problematik mengenai kurangnya generasi muda yang unggul selaku pemimpin bangsa pada waktu yang mendatang. Sehingga kolaborasi keilmuan PKn dengan kebijakan kampus merdeka, akan berdampak positif pada terbentuknya keadaban mahasiswa yang sesuai Pancasila bahkan UUD 1945, tetapi agar tidak sebatas wacana, tentu pada praksisnya, perlu komitmen serta konsistensi semua pihak dalam mewujudkan tujuan mulia tersebut.

Kesimpulan

Bentuk pembelajaran kampus merdeka begitu relevan dalam membangun mahasiswa sehingga menjadi warga negara beradab (*civic virtue*), karena praksis pembelajarannya bersifat utuh, dengan mengakomodir pembelajaran di kelas (teoretis) serta pembelajaran langsung di masyarakat (praktis). Pembelajaran PKn pada kampus merdeka, tentu perlu mengarah pada upaya konkret dalam memperkuat kompetensi kewarganegaraan milik mahasiswa, sehingga bersifat utuh, agar mahasiswa menjadi warga negara muda yang beradab. Dengan didukung konsep serta praksis pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang mencerminkan kampus merdeka, yaitu pembelajaran yang demokratis, partisipatif, modern, berfokus pada mahasiswa, kritis, memberi keteladanan, dan menyediakan pembelajaran langsung dimasyarakat, sebagai wahana untuk menganalisis dan merefleksikan kesenjangan mengenai cita-cita keilmuan PKn dalam mengatasi masalah dimasyarakat, serta upaya pemberdayaannya dengan realitas yang sesungguhnya. Sehingga konsep serta praksis pembelajaran PKn tersebut, berorientasi untuk meminimalisir terjadinya pembelajaran yang

sebatas pragmatis dan prosedural, yang tidak bermakna bahkan tidak berdampak nyata bagi perkembangan kompetensi pengetahuan, sikap serta keterampilan mahasiswa.

Referensi

- Daquila, T. C. (2013). Internationalizing Higher Education in Singapore. *Journal of Studies in International Education*, 17(5), 629–647. doi: <https://doi.org/10.1177/1028315313499232>
- Dias, D., & Soares, D. (2017). *Civic Learning Outcomes: a Step Towards an Inclusive Higher Education*. *International Journal of Inclusive Education*, 22(4), 360–374. doi: <https://doi.org/10.1080/13603116.2017.1365956>
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Jakarta: Kemendikbud.
- Dwintari, J. W. (2018). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Multikultural dalam Pembinaan Keberagaman Masyarakat Indonesia. *Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKn dan Sosial Budaya*, 2(1), 69-81.
- Fusnika. (2014). Pembinaan *Civic Disposition* Berbasis Nilai-Nilai Kemanusiaan pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kota Sukabumi. *JPIS: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 23(1), 50-57. doi: <https://doi.org/10.17509/jpis.v23i1.2063>
- Hamidah. (2019). Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. *Forum Paedagogik*, 11(1), 27-38. doi: <http://dx.doi.org/10.24235/edueksos.v9i1.6144>
- Karliani, E. (2014). Membangun *Civic Engagement* melalui Model *Service Learning* untuk Memperkuat Karakter Warga Negara. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 23(2), 71-78. doi:

- <http://dx.doi.org/10.17977/jppkn.v27i2.5517>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). *Peta Jalan Generasi Emas Indonesia 2045*. Jakarta: Kemendikbud.
- Lonto, A. L. (2019). Students' Civic Disposition through Learning Civics and Pedagogical Competences of High School Teachers. *Universal Journal of Educational Research*. 7(12), 35-41. doi: <https://doi.org/10.13189/ujer.2019.071905>
- Nanggala, A. & Malihah, E. (2020). Peran Tradisi Irung-Irung dalam Memperkuat Civic Engagement Generasi Muda di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. 5(1), 1-16. doi: <http://dx.doi.org/10.17977/um019v5i1p1-16>
- Nanggala, A. & Suryadi, K. (2020). Analisis Konsep Kampus Merdeka dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Global Citizen*, 9(2), 10-23. doi: <http://dx.doi.org/10.33061/jgz.v9i2.4545>
- Paramita, G. V. (2010). Studi Kasus Perbedaan Karakteristik Mahasiswa di Universitas 'X'-Indonesia dengan Universitas 'Y'-Australia. *Humaniora*, 1(2), 629-635. doi: <https://doi.org/10.21512/humaniora.v1i2.2904>
- Pratama, I. A. (2020). Pendidikan Politik di Perguruan Tinggi: Sebuah Konsepsi. *Sustainable: Jurnal Kajian Mutu Pendidikan*, 3(1), 15-22. doi: <https://doi.org/10.32923/kjimp.v3i1.1300>
- Raharja, R. M., Legiani, W. H., Sugiana, D. F. & Lestari, R. Y. (2017). Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Kompetensi Warga Negara Mahasiswa FKIP Untirta. *Untirta Civic Education Journal (UCEJ)*, 2(2), 199-213. doi: <http://dx.doi.org/10.30870/ucej.v2i2.2812>
- Rohani. & Samsiar. (2017). Upaya Guru dalam Meningkatkan Civic Knowledge Siswa melalui Model Pembelajaran *Controversial Issues* pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Mujahidin Pontianak. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(1), 49-59. doi: <http://dx.doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v7i1.3548>
- Rubei, M. A. (2014). Integrasi Nilai-Nilai Kewirausahaan dalam Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Upaya Membentuk *Economic Civic* (Ekonomi Warga Negara). *Jurnal Civicus*, 14(2), 54-73.
- Setiarsih, A. (2017). Diskursus Pendidikan Kritis (Critical Pedagogy) dalam Kajian Pendidikan Kewarganegaraan. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 76- 85. doi: <http://doi.org/10.25273/citizenship.v5i2.1310>
- Shivshenker. (2018). *Impact of Liberalization and Globalization on Higher Education*. *International Journal of Scientific Research*, 7(5), 21-23. doi: <https://www.doi.org/10.36106/ijsr>
- Wadu, L. B. Ladamay, I. & Jenia, A. (2020). Penguatan Keterlibatan Warga Negara dalam Pembangunan Berkelanjutan melalui Program Koperasi Serba Usaha. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 116-125. doi: <http://dx.doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v10i1.8536>
- Wibowo, A. P. & Wahono, M. (2017). Pendidikan Kewarganegaraan: Usaha Konkret untuk Memperkuat Multikulturalisme di Indonesia. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14(2), 196-205. doi: <https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.16043>
- Winataputra, U. S. (2016). Posisi Akademik Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan Muatan/Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam Konteks Sistem

Pendidikan Nasional. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 1(1), 15-36. doi: <https://doi.org/10.21067/jmk.v1i1.1184>
World Economic Forum. (2019). *The Global Competitiveness Report 2019*. Swiss: WEC.

Biarkan halaman ini tetap ada

[halaman ini sengaja dikosongkan]